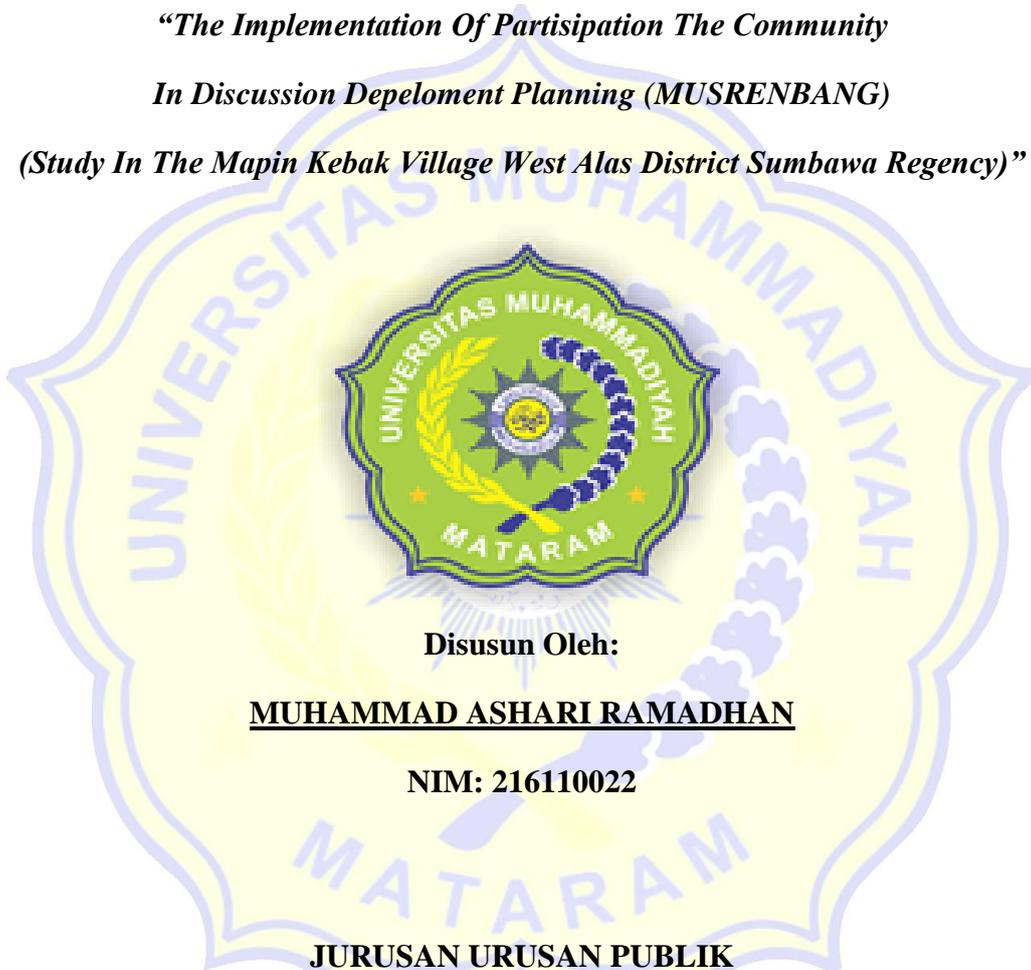


SKRIPSI

**PENYELENGGARAAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
(Studi Pada Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa)**

*“The Implementation Of Partisipation The Community
In Discussion Depeloment Planning (MUSRENBANG)
(Study In The Mapin Kebak Village West Alas District Sumbawa Regency)”*



Disusun Oleh:

MUHAMMAD ASHARI RAMADHAN

NIM: 216110022

**JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2020**

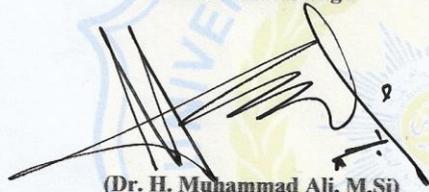
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini disetujui oleh pembimbing untuk di ujikan ke Panitia Ujian Skripsi
Program Studi Administrasi Publik pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Agustus 2020

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I



(Dr. H. Muhammad Ali, M.Si)
NIDN. 0306066801

Dosen Pembimbing II



√ (Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP)
NIDN. 0322048901

Mengetahui,

Program Studi Administasi Publik

Ketua



√ (RAHMAD HIDAYAT, S.AP., M.AP)
NIDN. 0822048901

PENGESAHAN SKRIPSI
PENYELENGGARAAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG)
(STUDI PADA MAPIN KEBAK KECAMATAN ALAS BARAT KABUPATEN
SUMBAWA

Oleh :
MUHAMMAD ASHARI RAMADHAN
NIM. 216110022
SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Sarjana Pada
Jurusan Urusan Publik Telah disetujui Oleh Tim Penguji
Pada tanggal seperti yang tertera di bawah ini.
Mataram, 18 Agustus 2020
Tim Penguji

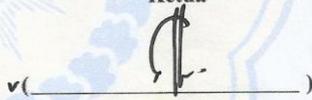
1. **Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**
NIDN. 0806066801



(_____)

Ketua

2. **Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP**
NIDN. 0822048901



(_____)

Anggota

3. **Drs. H. Darmansyah, M.Si**
NIDN. 00075914



(_____)

Anggota

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ASHARY RAMADHAN

NIM : 216110022

Dengan menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun diperguruan lain).
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, Agustus 2020



MUHAMMAD ASHARY RAMADHAN

NIM. 216110022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD..ASHARI..RAMADHAN.....
NIM : 216110022.....
Tempat/Tgl Lahir : Mapin..Kebak., 29..Januari..1998.....
Program Studi : Ilmu..Administrasi..publik.....
Fakultas : FISIPOL.....
No. Hp/Email : 085902545661.....
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Penyelenggaraan...partisipasi...Masyarakat...Dalam...Masyarakat...
perencanaan...pembangunan...(MUSRENBAN)...(Studi...pada...Desa...
Mapin..Kebak...kecamatan...Alas..Barat...Kabupaten...Sumbawa).....

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal :

Penulis

Muhammad Ashari Ramadhan
NIM.216110022

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Jadilah Diri Sendiri Karena Ketika Kita Berusaha Menjadi Orang Lain Disitulah Kita Tidak

Merasa Bangga Pada Diri Sendiri

Hidup Bukan Untuk Makan, Makan Untuk Hidup



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, sungguh tiada tuhan melainkan engkau. Dengan penuh ketundukan dan rasa syukur yang mendalam, dengan segenap cinta ku persembahkan karya ini kepada mereka yang telah mewarnai dan memberikan makna dalam hidup.

Kedua orang tua saya tercinta bapak A. Wahab dan ibu Indawati, sebagai tanda bukti, dan terima kasih yang tiada terhingga yang telah memberikan doa, dukungan, pengorbanan dan kasih sayang sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini

Saudara saya Amrullah, Susi Indrayati, Husnul Mahmudi yang selalu memberikan semangat, nasehat, dukungan, saran untuk menyelesaikan skripsi ini.

Saudara saya (anggota group No Rusak Nyata), saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama saya menyusun skripsi ini.

Teman kelas Administrasi Jurusan Urusan Publik serta teman satu angkatan dan untuk almamater Universitas Muhammadiyah Mataram.

Orang-orang yang tidak bias saya sebut satu persatu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya selama saya mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) (Studi Pada Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Samawa Sumbawa Besar. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung peneliti serta moril dan materil. Maka dengan ketulusan hati, saya selaku penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram dan jajarannya.
2. Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Ketua Prodi Administrasi Publik.
4. Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dosen Pembimbing I
5. Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Dosen Pembimbing II
6. Kedua Orang Tua saya yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati dalam menyusun proposal, Penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat peneliti harapkan demi kelayakan dan

kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima dan bermanfaat secara penuh oleh khalayak umum yang berminat dengan karya ini.

Mataram, Agustus 2020

Penulis,



ABSTRAK

Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)

(Studi Pada Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa)

Muhammad Ashari Ramadhan¹, Dr. H. Muhammad Ali, M.Si²,

Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP³

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya aparatur Desa Mapin Kebak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta untuk mengetahui wujud partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa.

Jenis penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Informan dalam penelitian ini ialah kepala desa, sekretaris desa, staf serta masyarakat desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Partisipasi Musrenbang dalam pengambilan keputusan di desa Mapin Kebak masih tergolong kurang atau rendah karena dimana kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menghadiri rapat musyawarah. 2) Partisipasi dalam pelaksanaan di desa Mapin Kebak juga masih rendah terutama kesadaran dan keterlibatan dari masyarakat karena dalam proses perencanaan pembangunan desa ada beberapa orang yang dipengaruhi atau sibuk dengan kepentingan masing-masing. Faktor pendukung a. Kemauan untuk berpartisipasi. b. Kemampuan untuk berpartisipasi. c. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi sedangkan hambatannya yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan MUSRENBANG.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Musrenbang

ABSTRACT

Organizing Community Participation in the Planning Conference Development (MUSRENBANG)

(Study in Mapin Kebak Village, Alas Barat District, Sumbawa Regency)

**Muhammad Ashari Ramadhan¹, Dr. H. Muhammad Ali, M.Si²,
Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP³**

This study aims to identify and explain the attempts of Mapin Kebak Village officials to increase community participation and to understand the community participation form in the development planning of Mapin Kebak Village, Alas Barat District, Sumbawa Regency. This research used a qualitative approach. According to Bogdan and Taylor, the qualitative method is a research procedure that results in descriptive data of written and spoken words from people and observed behavior. The informants were the village head, village secretary, staff, and the community of Mapin Kebak village, Alas Barat District, Sumbawa Regency.

The results showed 1) Participation of Musrenbang in decision making in Mapin Kebak village was low, relating the community awareness and concern of attending the meeting. 2) the community participation in Mapin Kebak village is also low, especially the attention and involvement in the village development planning process. Several people are influenced or busy with their respective interests. The supporting factors were a. Willingness to participate. b. Ability to participate. c. Opportunities for the community to participate. Meanwhile, the obstacle was the lack of community participation in organizing MUSRENBANG.

Keywords: Participation, Community, Musrenbang



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Landasan Teori.....	15
2.2.1. Teori Perencanaan Pembangunan.....	16
2.2.2. Teori Partisipasi	26
2.3. Landasan Konseptual	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	32
3.3. Sumber Data.....	33
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.4.1. Wawancara (<i>Interview</i>)	33
3.4.2. Observasi	35
3.5. Penentuan Informan	36
3.6. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1. Profil Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa	38
4.1.1. Letak Geografis Desa	38
4.1.2. Jumlah Penduduk Desa Mapin Kebak.....	40
4.1.3. Struktur Kepengurusan Aparatur Desa.....	41
4.2. Partisipasi Masyarakat Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa.....	43
4.2.1. Proses Kegiatan Musrenbang Desa Mapin Kebak	43

4.2.2. Keterlibatan Masyarakat Saat Berpartisipasi Dalam Musrenbang 46

4.3. Faktor Pendukung Dan Penghambatan Dalam Proses Partisipasi Masyarakat
Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa 66

4.3.1. Faktor Pendukung Dalam Proses Partisipasi Masyarakat Dalam
Musrenbang 66

4.3.2. Faktor Penghambat Dalam Proses Partisipasi Masyarakat Dalam
Musrenbang 70

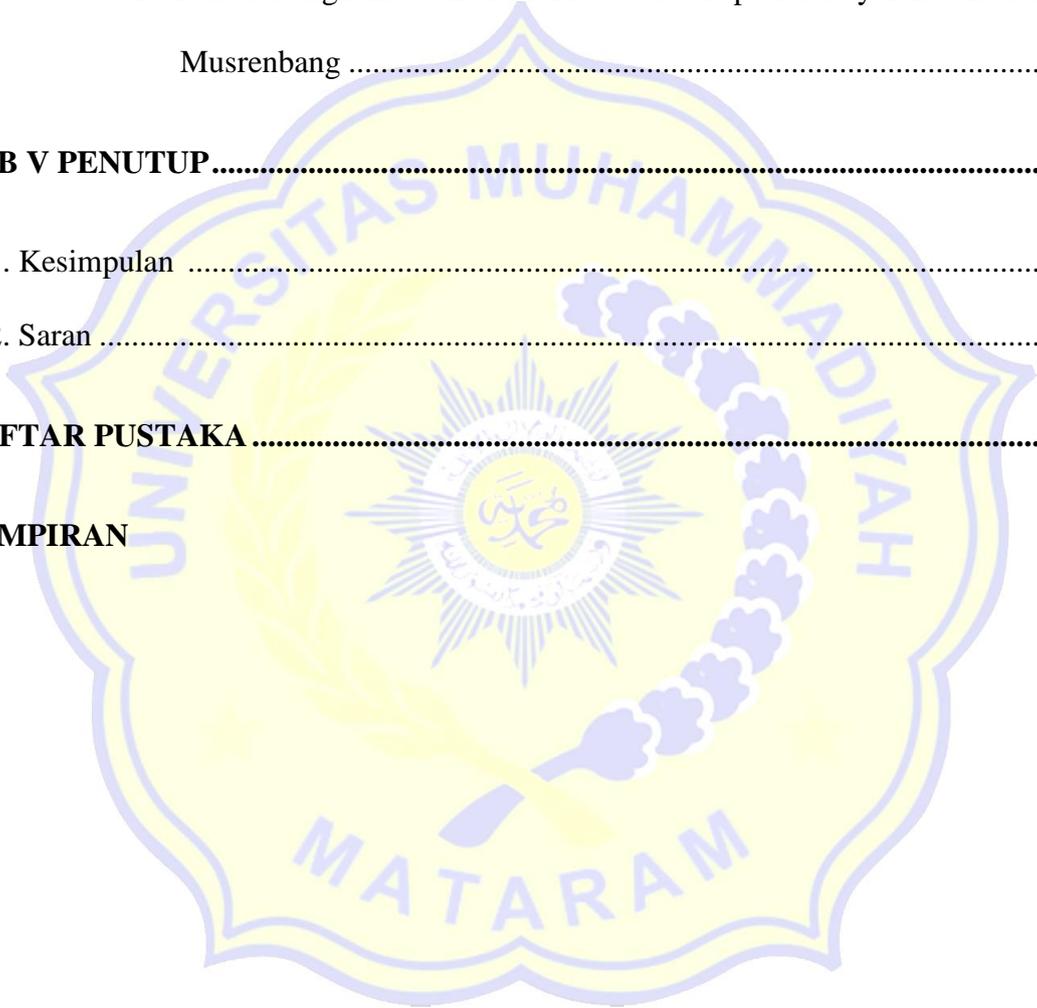
BAB V PENUTUP..... 73

5.1. Kesimpulan 73

5.2. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN

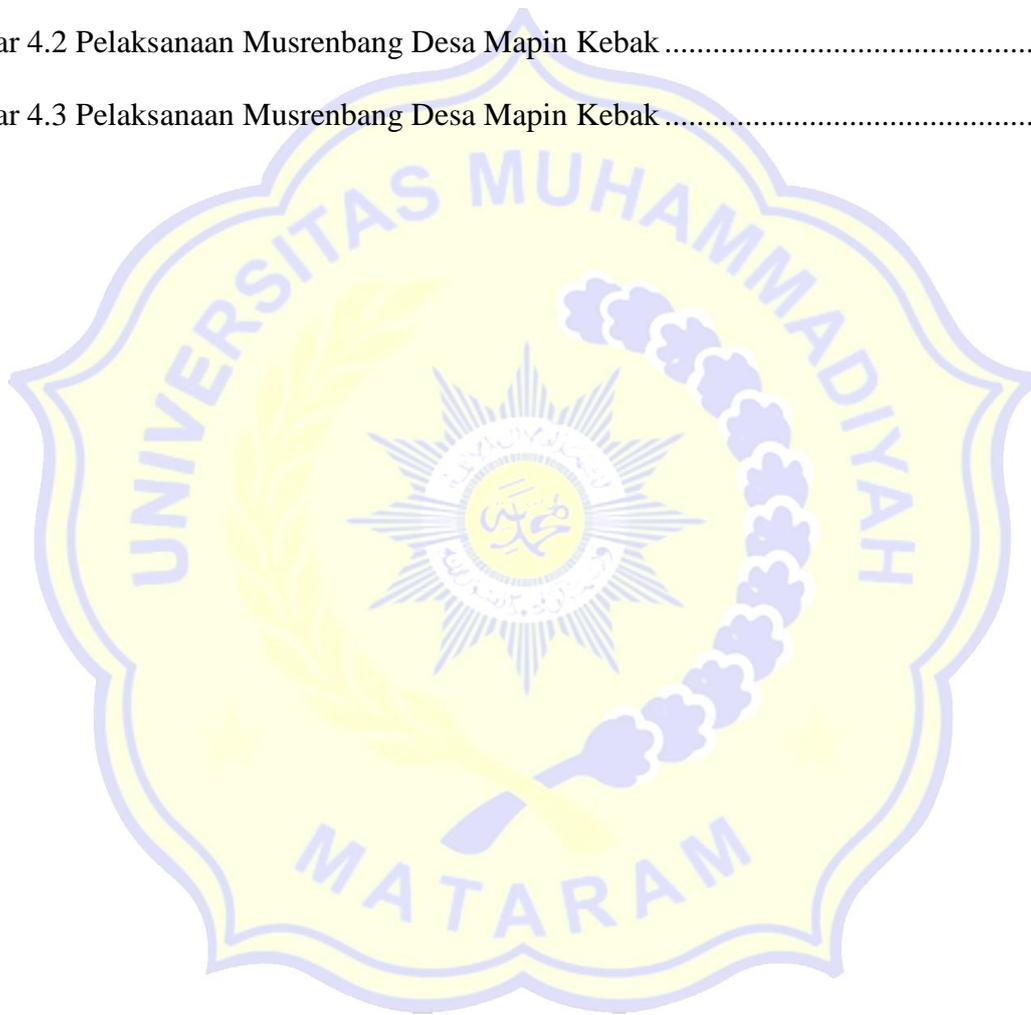


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3.1 Informan Yang Memberikan Informasi	36
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Desa Mapin Kebak.....	39
Tabel 4.2 Persebaran Penduduk Desa Mapin Kebak	40
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	41
Tabel 4.4 Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrembang	48
Tabel 4.5 Daftar Hadir Musrembang	50
Tabel 4.6 Daftar Warga Masyarakat Yang Tidak Hadir Dalam Musrembang	52
Tabel 4.7 Draf Prioritas Pembangunan Desa Mapin Kebak	53
Tabel 4.8 Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang Desa Mapin Kebak.....	53
Tabel 4.9 Daftar Hadir Peserta Musrenbang Desa Mapin Kebak Tahun 2018.....	55
Tabel 4.10 Daftar Warga Masyarakat Yang Tidak Hadir Dalam Musrenbang Desa Mapin Kebak Tahun 2018	57
Tabel 4.11 Draf Prioritas Pembangunan Desa Mapin Kebak Tahun 2018	58
Tabel 4.12 Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang Desa Mapin Kebak Tahun 2019	58
Tabel 4.13 Daftar Hadir Peserta Musrenbang Desa Mapin Kebek Tahun 2019.....	61
Tabel 4.14 Daftar Warga Masyarakat Yang Tidak Hadir Dalam Musrenbang Desa Mapin Kebak Tahun 2019.....	62
Tabel 4.15 Draf Prioritas Pembangunan Desa Mapin Kebak Tahun 2019.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kaitan Antara Aspek Perencanaan Pembangunan	22
Gambar 2.2 Pengukuran Sebuah Perencanaan Dalam Pembangunan	23
Gambar 2.3 Landasan Konseptual	30
Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa	43
Gambar 4.2 Pelaksanaan Musrenbang Desa Mapin Kebak	66
Gambar 4.3 Pelaksanaan Musrenbang Desa Mapin Kebak	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bergulirnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah saat ini menyusul lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah membawa dalam pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang di beri otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah menjadi peluang dan tantangan bagi daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena daerahlah yang lebih mengetahui aspirasi dan kehendak serta potensi yang dimiliki daerahnya. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (widjaja, 2004).

Suatu skema baru otonomi daerah, yang didalamnya termuat semangat melibatkan masyarakat, dengan menekankan bahwa kualitas otonomi daerah akan ditentukan oleh sejauh mana keterlibatan masyarakat, maka dengan sendirinya harus ditunjukkan adanya saluran aspirasi masyarakat semenjak dini (Abe, 2005).

Pembangunan yang dilakukan mencakup serangkaian proses-proses yang berkesinambungan. Tahap awal dari proses pembangunan adalah perencanaan. Didalam perencanaan ditetapkan ke arah kebijakan, strategi, skala prioritas program-program dan kegiatan-kegiatan indikatif lainnya untuk mencapai arah kebijakan tersebut. Dokumen-dokumen inilah yang akan mengarahkan ke proses pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa perencanaan merupakan kunci dari keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kedudukan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia menjadi semakin kuat. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka penyusunan perencanaan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap aparat pemerintah dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan bila hal ini tidak dilakukan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu (Sjafrizal, 2009).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan media utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam

penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan. Hal ini dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme, yang dimulai dari Musrenbang di tingkat *gampang*, Musrenbang ditingkat Kecamatan, Musrenbang di tingkat Kabupaten, dan untuk jenjang berikutnya hasil Musrenbang Kabupaten/Kota juga digunakan sebagai masukan untuk Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional.

Penjelasan ini juga sejalan dengan yang dijelaskan oleh Alexander Abe (2005) bahwa suatu perencanaan yang berbaris prakarsa masyarakat dimana perencanaan yang sepenuhnya mencerminkan kebutuhan kongkrit masyarakat dan dalam proses penyusunan benar-benar melihat aspirasi masyarakat setempat dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat dan mencapai kehidupan baru yang lebih baik dan bermakna melalui langkah-langkah pembangunan.

Proses Musrenbang bertujuan untuk mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan di beberapa tingkat, mulai dari pembahasan di tingkat *gampang*, dilanjutkan pembahasan ditingkat kecamatan. Data tersebut kemudian dikumpulkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah. Selanjutnya data tersebut diolah untuk dilakukan prioritas program/kegiatan di tingkat kabupaten/kota oleh Bappeda bersama para pemangku kepentingan yang kemudian disesuaikan pula dengan kemampuan pendanaan dan kewenangan daerah.

Musrenbang yang dilakukan di tingkat *gampang* berfungsi untuk menyepakati isu prioritas wilayah *gampang*, yang kemudian menjadi suatu program atau kegiatan pembangunan tahunan *gampang*. Program atau kegiatan yang dihasilkan kemudian dipilih berdasarkan sumber pembiayaannya yang terdiri dari Alokasi Dana Gampang (ADG), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun swadaya masyarakat. Selain itu, pelaksanaan Musrenbang *gampang* juga berfungsi untuk menetapkan wakil/delegasi yang akan mengikuti Musrenbang kecamatan.

Fungsi Musrenbang ditingkat kecamatan, selain untuk menjaring kebutuhan nyata masyarakat *gampang*, juga berfungsi mensesuaikan dengan kebijakan pembangunan Pemerintah kabupaten/kota dan sekaligus mengidentifikasi program-program atau kegiatan yang bersumber dari dana non-APBD atau program-program nasional yang langsung ke masyarakat.

Salah satu indikator pembangunan daerah yang paling utama adalah keikutsertaan masyarakat dalam mensukseskan pembangunan. Masyarakat harus lebih aktif dalam hal penyampaian aspirasi dan keluhan serta ikut mengawal kegiatan yang akan dilakukan dilingkungannya hingga turut serta mengawal proses pembangunan yang telah disepakati bersama. Dalam proses pelaksanaan Musrenbang yang dilakukan di desa Mapin Kebak kecamatan Alas Barat kabupaten Sumbawa banyak terdapat kesenjangan antara teori/aturan normatif dengan praktek di lapangan, diantaranya adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat *gampang*, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang Musrenbang. Hal ini yang kemudian menjadi permasalahan serius dalam proses pelaksanaan Musrenbang di desa MapinKebak kecamatan Alas Barat kabupaten Sumbawa.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan Musrenbang dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang Musrenbang ini merupakan sebagian permasalahan yang akan berdampak pada penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian mengenai partisipasi pelaksanaan Musrenbang dalam penjangkaran aspirasi masyarakat di DesaMapinKebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat di Desa Mapin kebak kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa?
2. Apa yang mempengaruhi/faktor pendukung dan penghambat dalam partisipasi masyarakat di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya aparatur Desa Mapin Kebak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Untuk mengetahui wujud partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperdalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang penyampaian aspirasi dalam Musrenbang dan menjadi bekal untuk mengimplementasikan teori yang didapat dibangku perkuliahan secara rill.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Sumbawa dalam meningkatkan pembangunan yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, baik secara infrastruktur maupun suprastruktur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis membaca diantaranya:

Pertama, Paselle (2013) melakukan penelitian Pembangunan Partisipatif: Studi Tentang Efektivitas Musrenbang Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara. Menemukan bahwa Perencanaan Pembangunan Partisipatif merupakan salah satu pendekatan perencanaan pembangunan di daerah yang mewajibkan keterlibatan masyarakat.

Kedua, Sidik (2013) melakukan penelitian tentang Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi tentang Musrenbang di Kabupaten Sumenep). Hasil penelitian Implementasi kebijakan pembangunan di Kabupaten Sumenep sejak awal, semua pihak sepakat bahwa mewujudkan visi pembangunan daerah, yakni membangun masyarakat Sumenep yang sejahtera, agamis, nasionalis, dan mandiri.

Ketiga, Warjio (2014) melakukan penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). Salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan masyarakat, yaitu berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.

Keempat, Akbar (2014) melakukan penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2014. Bahwa partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Sembulang tahun 2014 masih sangat rendah dan terkesan apatis, dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat, Kewenangan dalam pengambilan keputusan serta cara metode penyampaian usulan.

Kelima, Ashari, Wahyunadi, dan Hailuddin (2015) meneliti tentang Pembangunan Daerah Di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013). proses partisipatif yang melibatkan masyarakat hanya terjadi pada tahap penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, dan perumusan tujuan, tidak pada tahap penetapan langkah-langkah rinci dan perancangan anggaran.

Keenam, Maryam (2015) melakukan penelitian tentang Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Kebumen Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus). Menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan di desa Kebumen tahun 2014 tidak berjalan efektif dan partisipatif. Banyaknya usulan program yang dikumpulkan tidak sebanding dengan pelaksanaannya.

Ketujuh, Hanafie (2015) melakukan penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Perspektif Effective Governance (Studi pada Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten). Bahwa partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Sembulang tahun 2014 masih sangat rendah dan terkesan apatis, dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat, Kewenangan dalam pengambilan keputusan serta cara metode penyampaian usulan.

Kedelapan, Nugroho (2016) melakukan penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Caturtunggal, kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Menunjukkan bahwa musrenbang di Desa Caturtunggal tidak hanya menjadi ruang publik bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan membuat konsensus.

Kesembilan, Kevin, Imam, dan Hasanah (2018) melakukan penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Tingkat Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan kegiatan program prioritas pembangunan fisik hasil musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2016 dapat dilihat belum efektif sepenuhnya karena dalam realisasinya masih ada beberapa kegiatan atau program yang tidak berjalan dan tidak tepat sasaran serta waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kesepuluh, Manghayu (2018) melakukan penelitian tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang. Tujuannya untuk memastikan bahwa hubungan lintas pemerintahan itu melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat dihasilkan lebih efisien, produktif dan responsif.

Kesebelas, Pratama, Fatmawati, dan Azikin (2018) melakukan kajian tentang Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan musyawarah

perencanaan pembangunan Desa di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Tahapan persiapan, dan tahapan pelaksanaan. Kedua indikator ini berjalan dengan baik.

Keduabelas, Ismiyana (2018) melakukan penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Dongkalaea Kecamatan Wawoni Utara Kabupaten Konawe Kepulauan. Menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa belum berjalan dengan efektif.

Tabel 2.1.

Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil
1	Enos Paselle, 2013.	Perencaan Pembangunan Partisipatif: Studi Tentang Efektivitas Musrenbang Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegra.	Perencaan Pembangunan Partisipatif merupakan salah satu pendekatan perencanaan pembangunan di daerah yang mewajibkan keterlibatan masyarakat.
2	Soengkono Sidik, 2013.	Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi tentang Musrenbang di Kabupaten Sumenep).	Implementasi kebijakan pembangunan di Kabupaten Sumenep sejakawal, semua pihak sepakat bahwa mewujudkan visi pembangunan daerah, yakni membangun masyarakat Sumenep yang sejahtera, agamis, nasionalis, danmandiri.
3	Warjio, 2014.	Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang	Salah satu cirri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan masyarakat, yaitu berdasarkan pada

		Kabupaten Dairi).	masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.
4	Nanda Wahyu Akbar, 2014.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2014.	Bahwa partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Sembulang tahun 2014 masih sangat rendah dan terkesan apatis, dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat, Kewenangan dalam pengambilan keputusan serta cara metode penyampaian usulan.
5	Masjudin Ashari, Wahyunadi, dan Hailuddin, 2015.	Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses partisipatif yang melibatkan masyarakat hanya terjadi pada tahap penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, dan perumusan tujuan, tidak pada tahap penetapan langkah-langkah rinci dan perancangan anggaran.
6	Dewi Maryam, 2015.	Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pelaksanaan Musyawarah	Menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan di desa Kebumen tahun 2014 tidak

		perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Desa Kebumen Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus).	berjalan efektif dan partisipatif. Banyaknya usulan program yang dikumpulkan tidak sebanding dengan pelaksanaannya.
7	Hania Hanafie, 2015.	Efektivitas Pelaksanan Musrenbang Perspektif Effective Governance (Studi pada Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten).	Menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Musrenbang perspektif kinerja dapat dikategorikan sedang.
8	Mochammad Rindho Nugroho, 2016.	Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Caturtunggal, kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.	Menunjukkan bahwa musrenbang di Desa Caturtunggal tidak hanya menjadi ruang publik bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan membuat konsensus.
9	Kevin TioPrasetio, Imam Surya, NurHasanah, 2018.	Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Tingkat Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.	Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan kegiatan program prioritas pembangunan fisik hasil musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2016 dapat dilihat belum efektif sepenuhnya karena adalah mrealisasinya masih ada beberapa kegiatan atau program yang tidak berjalan dan tidak tepat sasaran serta waktu pelaksanaan yang tidak sesuai

			dengan ketentuan yang ada.
10	Agung Manghayu, 2018.	Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang.	Tujuannya untuk memastikan bahwa hubungan lintas pemerintahan itu melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat dihasilkan lebih efisien, produktif dan responsif.
11	Muh. Ryan Pratama, Fatmawati, dan Ruskin Azikin, 2018.	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Tahapan persiapan, dan tahapan pelaksanaan. Kedua indikator ini berjalan dengan baik.
12	Ismiyana, 2018.	Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di	Menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)

		Desa Dongkalaea Kecamatan Wawoni Utara Kabupaten Konawe Kepulauan.	desabelum berjalan dengan efektif.
--	--	---	---------------------------------------

(Sumber : di berbagai jurnal tahun 2013-2018)

Dari tabel diatas dapat kita lihat keterkaitan, kekurangan, dan kelebihan dari jurnal yang digunakan sebagai literature pendukung dalam penelitian ini. Sehingga dapat dilihat bahwa novelty/kebaruan dari penelitian ini, dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kebaruan dari penelitian ini dapat dilihat dari pengukuran partisipasi yang digunakan.

Bahwasanya pengukuran partisipasi yang digunakan berbeda dengan penelitian-penelitian yang digunakan pada refrensi jurnal diatas. Dalam pengukur partisipasi yaitu tempat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tempat proses.

2.2. Landasan Teori

Sebagai titik tolak atau landasan berfikir dalam dalam menyoroti atau memecahkan masalah, perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*) landasan teoritis (Sugiyono, 2004).

Menurut Hoy dan Miskel (dalam Sugiyono, 2004) teori adalah seperangkat konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam sebahgai organisasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi landasan teorinya adalah sebagai berikutnya:

2.2.1. Teori Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia (Sjafrizal, 2009).

Sedangkan perencanaan pembangunan menurut Tjokroamidjojo (2002) adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih efisien dan efektif. Perencanaan pembangunan juga merupakan suatu tehnik atau cara yang akan dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran pembangunan di tingkat pusat dan tingkat daerah. Tujuan dan sasaran

tersebut dapat berupa tujuan ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan keamanan (Abipraja, 2002).

Khusus untuk meluruskan pemahaman dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah”.

Dari segi arus informasi, Kunarjo (1992) menjelaskan bahwa perencanaan dapat dibedakan menjadi dua jenis:

- a. Perencanaan dari atas ke bawah, yaitu perencanaan yang sarannya ditetapkan dari tingkat atas (nasional atau pusat).
- b. Perencanaan bawah ke atas, yaitu perencanaan yang diusulkan dari bawah (daerah) berdasarkan penilaian dan perhitungan sendiri.

Pendekatan perencanaan dari bawah lazim juga disebut sebagai perencanaan partisipatif. Arif (2006) menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu negara. Oleh sebab itu, dalam perencanaan pembangunan, pemerintahan harus melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam melaksanakan pembangunan (partisipatif). Dengan kata lain, partisipasi masyarakat merupakan kata kunci agar suatu pembangunan berhasil sukses.

Menurut Juliantara partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan dan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif (Juliantara, 2004).

Menurut Adisasmita (2006), partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam

pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan.

Raharjo Adisasmita juga mengatakan peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (pedesaan). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih aktif dan efisien, yaitu dalam hal sebagai berikut:

1. Aspek masukan atau input (Sumber Daya Manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi)
2. Aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan)
3. Aspek keluar atau output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi)

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Safi'i, 2007) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu:

1. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan.

Adapun menurut Dadang Juliantara (2004) pengembangan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan mempunyai beberapa maksud yaitu:

1. Partisipasi akan memungkinkan masyarakat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri dan dengan demikian akan memudahkan rakyat/masyarakat menghadapi situasi-situasi sulit serta mampu menolak berbagai kecenderungan pembangunan yang merugikan.

2. Partisipasi tidak saja menjadi cermin kongkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan untuk memperjuangkan tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikan kepentingan rakyat.
3. Persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat, prinsip ini sekaligus menjadi titik pijak suatu kepercayaan kepada rakyat bahwa rakyat tidak perlu dimaknai sebagai kebodohan melainkan sebagai objek pembangunan yang mempunyai kemampuan.
4. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan ada sikap yang terbuka dari penyelenggaraan pemerintahan tentu saja akan menjadi basis bagi suatu “kepercayaan sosial politik” yang dengan demikian akan meningkatkan suatu proses penyelenggaraan pemerintah yang demokrasi.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, Sjafrizal (2009) menyimpulkan bahwa komponen utama dari perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Merupakan usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan.
2. Mencakup periode jangka panjang, menengah dan tahunan.
3. Menyangkut dengan variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Mempunyai suatu sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan keinginan masyarakat.

Dalam beberapa buku literatur perencanaan pembangunan (*development planning*), pembahasan terhadap pentingnya perencanaan ini sering dikaitkan dengan pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, pembahasan pentingnya aspek perencanaan yang dikaitkan dengan aspek pembangunan dapat diklarifikasikan menjadi dua topik utama (Soekartawi, 1990), yaitu:

1. Perencanaan sebagai “alat” dari pembangunan; dan
2. Perencanaan sebagai tolak ukur dari berhasil-tidaknya pembangunan tersebut.

Perencanaan dianggap sebagai “alat” pembangunan, karena perencanaan memang merupakan alat strategis dalam menuntun jalannya pembangunan. Suatu perencanaan yang disusun secara acak-acakan (tidak sistematis) dan tidak memperhatikan aspirasi *target group* (sasaran), maka pembangunan yang dihasilkan juga tidak seperti yang diharapkan. Dengan demikian, didalam konteks perencanaan sebagai ”alat”, perencanaan mempunyai keunggulan komprehensif, yang antara lain dapat dituliskan sebagai berikut:

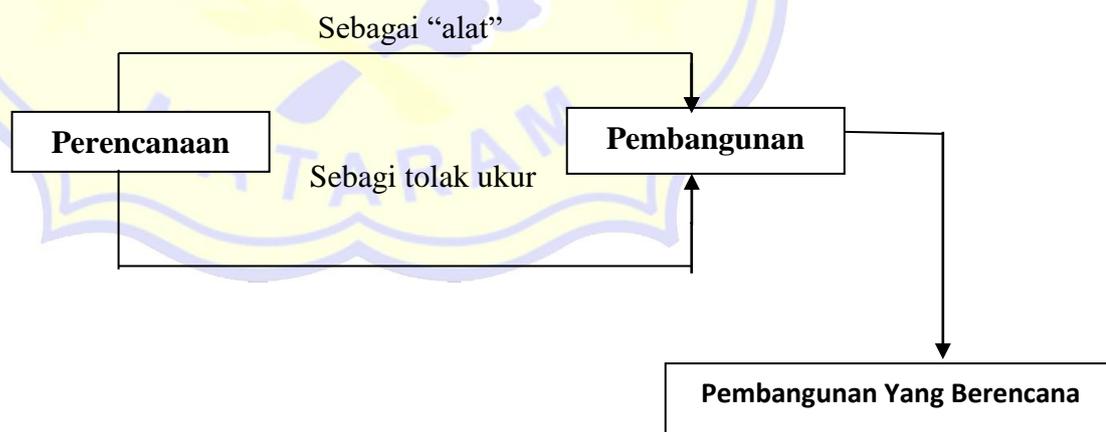
1. Perencanaan dapat dipakai sebagai alat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik diharapkan akan menghasilkan kegiatan pembangunan yang baik, bila faktor-faktor pendukungnya memenuhi persyaratan.
2. Perencanaan dapat dipakai sebagai penentuan berbagai alternatif dari berbagai kegiatan pembangunan. Dengan demikian, pemilihan alternatif yang baik atau yang terbaik sangat tergantung dari perencanaan yang telah disusun.

3. Perencanaan dapat dipakai sebagai penentuan skala prioritas. Hal demikian dapat dimengerti karena terbatasnya sumberdaya yang biasanya selalu dihadapi oleh para pelaksanaan pembangunan.
4. Perencanaan dapat dipakai sebagai alat “peramalan” (*forecasting*) dari kegiatan pada masa akan datang. Apa yang terjadi ilmu tahun mendatang dapat “diramalkan” melalui perencanaan yang dibuat sekarang. Dengan demikian, perencanaan yang baik akan menghasilkan apa yang terjadi pada masa mendatang.

Perencanaan memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan, diperlukan sebagai perencanaan yang baik untuk menjamin pembangunan yang tepat sasaran. Pembangunan harus didasari oleh suatu keterkaitan dengan sebuah perencanaan yang memiliki skema, sehingga pembangunan memiliki acuan untuk dijalankan dan memiliki sandaran pengukuran untuk dilihat keberhasilannya. Secara skematis, kaitan antara aspek perencanaan dan pembangunan dapat digambarkan seperti gambar berikut ini.

Gambar 2.1.

Skema kaitan antara aspek perencanaan dan pembangunan



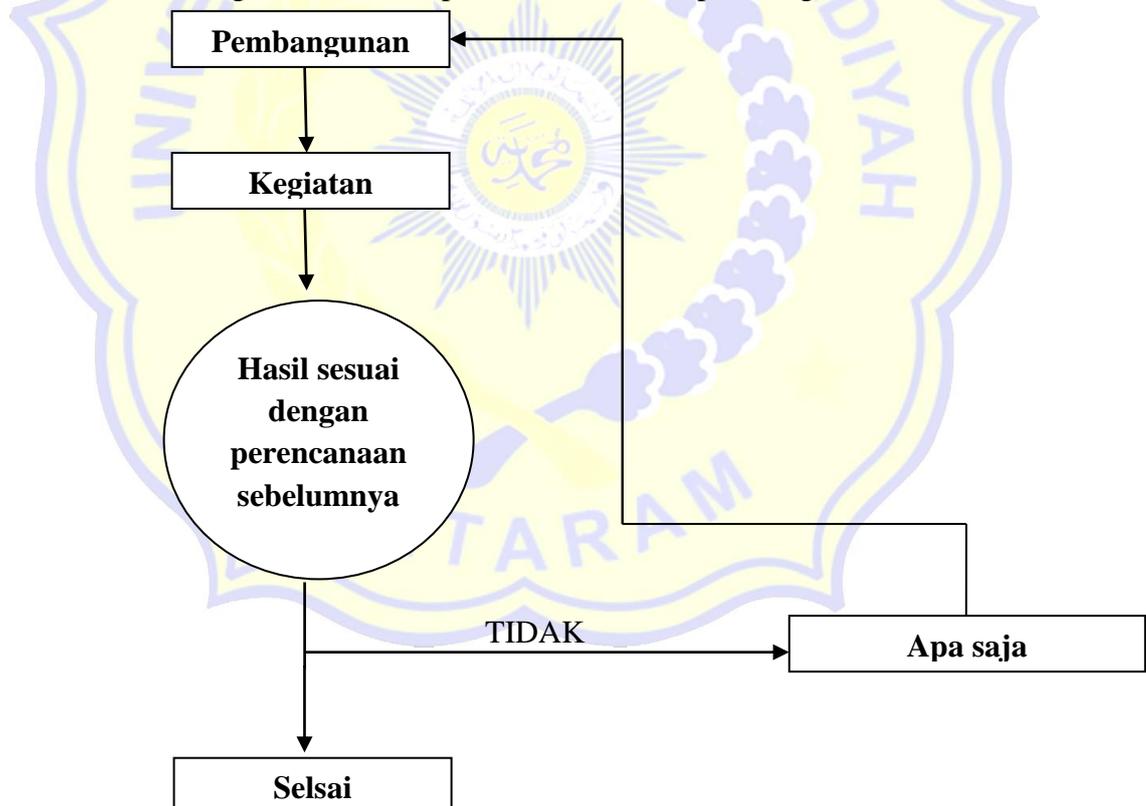
(Sumber: Soekartawi, 1990, dalam buku *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan*)

Berdasarkan skema di atas, dapat dijelaskan bahwa fungsi perencanaan dalam pembangunan adalah sebagai alat pembangunan, hal ini dikarenakan perencanaan memang merupakan alat strategis dalam menuntun jalannya pembangunan, pembangunan harus memiliki sebuah perencanaan yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga dapat menghasilkan suatu pembangunan yang berencana.

Sementara disisi lain, perencanaan dapat dipandang sebagai “tolak ukur” dari keberhasilan dan kegagalan dari pembangunan yang mengandung arti bahwa kegiatan pembangunan yang “gagal” bisa jadi karena aspek perencanaannya yang “tidak baik”, dan begitu pula sebaliknya. Perencanaan akan menjadi acuan untuk dijadikan tolak ukur keberhasilan dan kegagalan dalam pembangunan, sehingga setiap keberhasilan dan kegagalan perencanaan akan lebih terukur. Keberhasilan dan kegagalan perencanaan dalam pembangunan secara skematis dapat dilihat gambar berikut ini.

Gambar 2.2.

Pengukuran sebuah perencanaan dalam pembangunan



(Sumber: Soekartawi, 1990, dalam buku *Prinsip Dasar Perencanaan Pembnagunan*)

Berdasarkan skema diatas, dapat dijelaskan bahwa perencanaan berfungsi sebagai tolak ukur dari keberhasilan atau kegagalan suatu pembangunan. Penilaian tersebut dapat dilakukan setelah kegiatan pembangunan dilakukan dan dibandingkan dengan hasil perencanaan. Hasil yang dilihat apakah telah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Jika tidak maka akan diidentifikasi apa saja kendalanya, sehingga dapat dikaji seberapa besar kegagalan atau keberhasilannya, identifikasi masalah, dan melakukan revisi terhadap perencanaan pembangunan yang ada.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui beberapa tahapan yang harus dilalui oleh para perencana. Secara garis besar, tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah menurut PPNNo.8 Tahun 2008, dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. Penyusunan Rencana Awal

Pada proses penyusunan rancangan awal rencana pembangunan dilakukan oleh Bappeda. Rencana awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Provinsi (untuk kabupaten/kota) serta RPJP Nasional. Selain itu dalam penyusunan RPJP Daerah yang dilakukan oleh Bappeda meminta masukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan.

Penyusunan rancangan awal rencana pembangunan untuk Rencana Pembangunan Rencana Menengah (RPJM) Daerah yang dilakukan oleh Bappeda memuat visi, misi dan program kepala daerah terpilih dengan tetap berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah sebelumnya. Pola seperti ini diharapkan bisa dijalin sinambungan antara program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh kepala daerah sebelumnya.

Untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maka rancangan awal disusun dengan cara menjabarkan dari RPJP Daerah dengan mengkoordinasikannya dengan rancangan Rencana Kerja SKPD. Rancangan awal RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta perkiraan maju dengan pertimbangan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Rencana tersebut nantinya akan menjadi bahan dalam menyelenggarakan Musrenbang RKPD.

2. Musrenbang

Tahapan berikut adalah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang merupakan media partisipasi publik yang digunakan untuk menjangkau dan menampung aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Kegiatan Musrenbang diawali pada tingkat bawah yaitu desa/kelurahan. Berbagai usulan yang muncul pada Musrenbang tersebut disusun skala prioritas berdasarkan urgensi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan yang bisa dijalankan oleh desa/kelurahan secara mandiri akan dilaksanakan oleh desa/kelurahan. Sedangkan usulan kegiatan yang tidak bisa dilakukan oleh desa/kelurahan maka dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan.

Musrenbang kecamatan dilakukan setelah pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan selesai. Musrenbang kecamatan dilakukan untuk mengkoordinasikan rencana kegiatan desa/kelurahan dalam lingkup wilayah kecamatan yang bersangkutan dan dalam forum tersebut dilakukan pemilihan terhadap usulan-usulan program/kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh desa/kelurahan.

Materi Dalam Negeri. RKPD yang telah ditetapkan tersebut nantinya dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD.

Dari uraian penjelasan tentang mekanisme proses penyusunan perencanaan pembangunan tersebut dijelaskan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah sejak awal yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, kemudian pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir hingga penetapan RKPD berlangsung secara variatif antara *top-down* dan *bottom-up*.

2.2.2. Teori Partisipasi

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Ada 4 (empat) poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pemimpinnya serta antara sistem sosial didalam masyarakat dengan sistem diluarnya.

2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat.
3. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial.
4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan didalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorang atau kelompok.

Menurut Histiraludin (dalam Handayani 2006) “Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”. Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pemngembangan masyarakat, seolah-olah menjadi “model baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang teteapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Selanjutnya menurut Slamet (2003) menyatakan bahwa, partisipasi Valderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu :

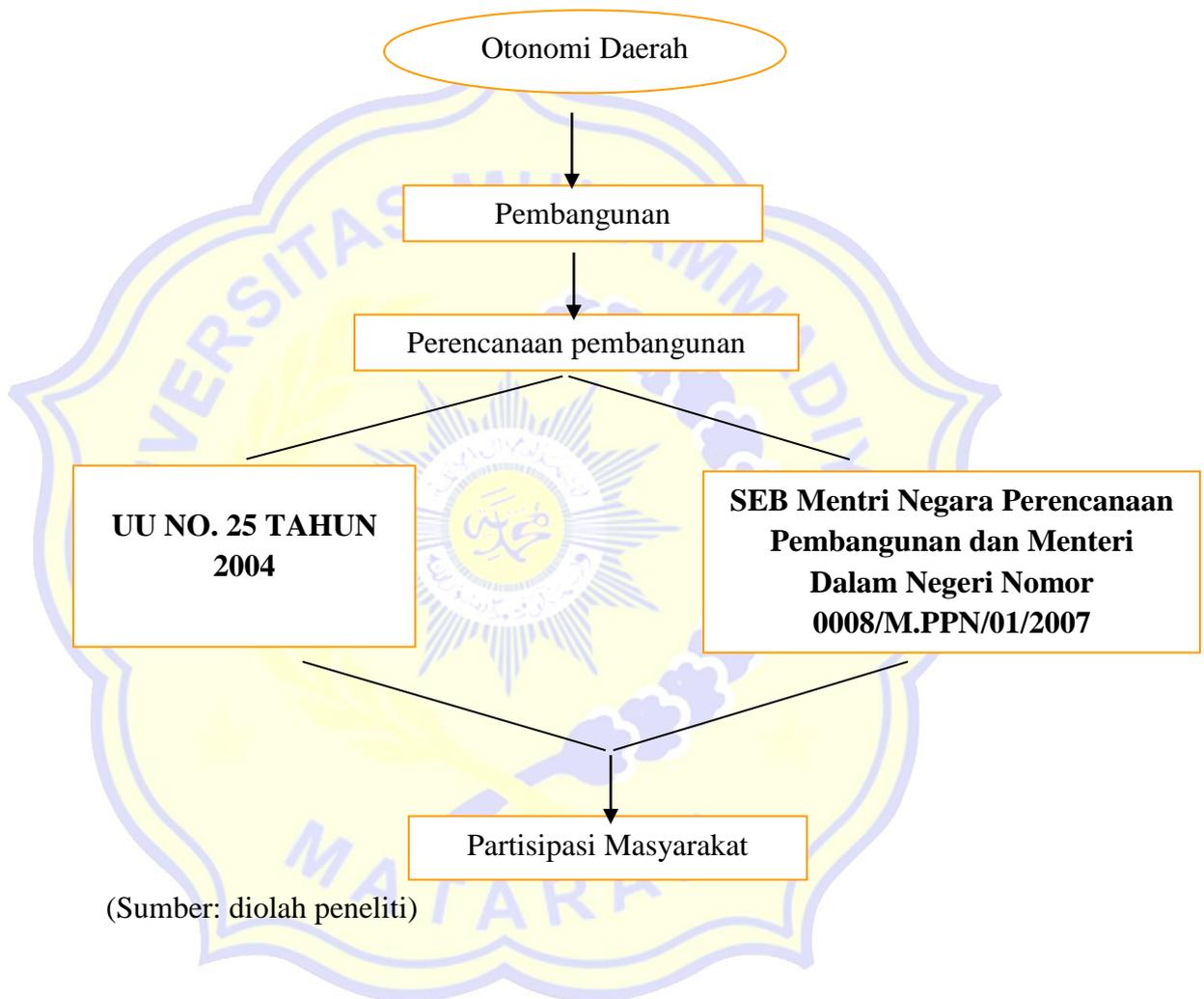
1. Partisipasi politik (political participation) lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.

2. Partisipasi social (social participation) partisipasi ditempatkan sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.
3. Partisipasi warga (citizen participation/citizenship) menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum terisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik.



2.3. Landasan Konseptual

Gambar 2.3
Landasan Konseptual



Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan di seluruh daerah di Indonesia, pembangunan merupakan suatu hal untuk yang harus dilakukan oleh setiap daerah dalam rangka memajukan daerahnya masing-masing, untuk itu dibutuhkan setiap daerah dibutuhkan suatu proses perencanaan pembangunan.

Proses perencanaan pembangunan di Indonesia dikenal dengan sebutan Muarenbang, dimana fokus utamanya adalah dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 050/264A/SJ.

Namun kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam proses Musrenbang masih kurang. Untuk itu, diperlukan beberapa langkah atau upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam Musrenbang. Menumbuhkan kesadaran di antara masyarakat bahwa partisipasi sangat penting diperlukan kerja sama yang maksimal dari pemerintah, upaya agar masyarakat senantiasa aktif menyumbangkan segala potensi dirinya untuk pengembangan atau pembangunan agar berhasil.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (J. Moleong, 2007).

Alasan digunakannya pendekatan kualitatif ini adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam berbagai permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini sehingga dapat menguatkan hasil penelitian.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang hendak diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa. Alasan penulis tertarik dengan lokasi ini karena ingin melihat tentang sejauh mana partisipasi masyarakat terhadap musrenbang tahunan yang diadakan di Desa Mapin Kebak, alasan lain yakni partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang tingkat desa perlu dikaji demi tercapainya demokrasi yang baik, mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat nasional.

3.3. Sumber Data

Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah menelaahan dokumen, informasi, foto, film, dan sebagainya. Pemilihan sumber data sesuai dengan acuan teori dan rumusan masalah. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder.

1. Data primer/ data lapangan adalah data yang dalam hal ini bersumber dari orang dan dokumen.
2. Data skunder/ kepustakaan adalah data yang dalam hal ini bersumber dari buku-buku teks, teori-teori, peraturan perundang-undang, tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi, keterangan-keterangan data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer yaitu perolehan data melalui kegiatan peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, kegiatan ini dilakukan dengan cara:

3.4.1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti yang nantinya akan menjadi pewawancara dengan sejumlah individu yang akan diwawancara atau responden (Silalahi, 2006). Wawancara juga dikmanai sebagai kegiatan pengumpulan data dengan teknik tanya jawab antara dua orang yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian (Hadi, 1993).

Wawancara terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Jenis wawancara yang digunakan peneliti ini adalah jenis wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ini memerlukan jadwal yang pasti yang ditentukan oleh pewawancara (Silalahi, 2006). Selain itu dalam wawancara ini haruslah dipastikan responden akan menerima stimulus wawancara yang sama, pertanyaan yang sama dan tiap responden dapat menangkap maksud pertanyaan itu dengan sama. Wawancara terstruktur ini dapat dilakukan oleh peneliti apabila telah mengetahui secara jelas mengenai apa saja informasi yang dibutuhkan dan juga telah memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya (Silalahi, 2006).

Pedoman wawancara (*interview guide*) merupakan salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam proses wawancara. Pedoman wawancara (*interview guide*) adalah serangkaian pedoman wawancara yang digunakan sebagai alat untuk mengajukan pertanyaan kepada informan (Hadari Nawawi, 1993). Dalam penelitian ini digunakan pedoman wawancara dengan pertanyaan terbuka yang memungkinkan setiap pertanyaan berkembang ke arah yang lebih spesifik. Selain pedoman wawancara peneliti menggunakan alat perekam (*recorder*) sebagai alat bantu merekam hasil wawancara.

3.4.2. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan catatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam metode observasi penulis melakukan pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat pembuktian terhadap informasi yang diperoleh sebelumnya sambil mencari informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti (Hadi, 1993).

Sedangkan pengumpulan data skunder merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data baik berupa bahan tertulis maupun dalam bentuk gambar yang dapat digunakan untuk memperluas data yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya gambar sesuatu yang diselidiki dapat dilihat dengan jelas. Teknik ini digunakan untuk memperoleh landasan penulis ilmiah, termasuk hasil peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dimiliki untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Data skunder ini menggunakan berbagai literatur seperti buku-buku, majalah, jurnal dan laporan peneliti serta yang lainnya.

3.5. Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai topik penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya, disamping informasi yang dijadikan subjek penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel. 3.1.

Informan yang memberikan informasi

Unit Analisis	Jumlah
1. Kepala Desa Mapin Kebak	1 Orang
2. Sekretaris Desa Mapin Kebak	1 Orang
3. Staf Desa Mapin Kebak	1 Orang
4. Masyarakat Desa Mapin Kebak	9 Orang
Total	12 Orang

(Sumber: diolah peneliti)

3.6. Teknik Analisa Data

Data yang dikumpulkan, diolah kemudian dianalisis untuk disimpulkan sebagai hasil penelitian. Untuk keperluan analisis data, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan (J. Moleong, 2010).

Dalam penulis skripsi ini penulis menyelesaikan dengan melalui beberapa tahapan pengolahan data, yaitu sebagai berikut:

1. Pertama penulis mengumpulkan data dengan mewawancarai informan penelitian, kemudian menganalisis hasil wawancara.
2. Kemudian menginterpretasikan hasil analisis baik dari wawancara, sehingga dapat mengetahui Partisipasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat Desa MapinKebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa.
3. Data yang telah dikumpulkan agar mudah dianalisis dan disimpulkan maka penulis menggunakan analisis yang menghasilkan deskriptif analisis.
4. Proses analisis data menggunakan pola berfikir induktif yaitu proses pengolahan data dari hal-hal yang khusus dan diperoleh dari informan kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

